






	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: <a href="mailto:palangkaraya@ptun.org">palangkaraya@ptun.org</a>	<b>No. Dokumen</b>	SOP/019/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	1/2
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI</b>			

<b>TUJUAN :</b> Prosedur ini dibuat sebagai pedoman dalam Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, agar dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan standart sistem manajemen mutu ISO 9001:2008.	
<b>RUANG LINGKUP :</b> Prosedur ini mencakup proses penanganan Layanan Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali yang masuk ke Kepaniteraan Muda Perkara, tindak lanjut terhadap Penerimaan Perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah tersedianya kelengkapan biaya proses perkara sehingga perkara Peninjauan Kembali siap untuk didaftarkan.	
<b>DASAR HUKUM :</b> 1. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan; 3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Ada Di Bawahnya; 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b> 1. SLTA 2. S1-Hukum
<b>KETERKAITAN :</b> 1. SOP pendaftaran perkara peninjauan kembali 2. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi Perkara PK 3. SOP Pencabutan Perkara PK 4. SOP Pengiriman Berkas Perkara PK 5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara Banding/Kasasi/PK	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</b> 1. Berkas perkara 2. SKUM 3. ATK, computer/laptop, printer 4. Slip setoran biaya perkara 5. Buku Jurnal Keuangan Perkara PK 6. Buku Register Perkara PK
<b>PERINGATAN :</b> Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b> Berkas Perkara Peninjauan Kembali
<b>DEFINISI :</b> 1. Peninjauan Kembali : upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi.	

	<b>PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA</b> Jl. Tjilik Riwut Km 5 Palangka Raya Website: <a href="http://www.ptun-palangkaraya.go.id">http://www.ptun-palangkaraya.go.id</a>   Email: <a href="mailto:palangkaraya@ptun.org">palangkaraya@ptun.org</a>	<b>No. Dokumen</b>	SOP/019/PRK/2018
		<b>Revisi Ke</b>	00
		<b>Tgl Berlaku</b>	02 Januari 2018
		<b>Halaman</b>	2/2
		<b>Disahkan Oleh</b>	Ketua PTUN P.Raya
<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERIMAAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI</b>			

No	Aktivitas	Pelaksana			MutuBaku		
		Petugas Meja III	Panitera Muda Perkara	Panitera	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menerima pengajuan permohonan upaya hukum PK dari pihak/kuasa hukum pemohon PK				- Berkas perkara	1 hari	Diterimanya berkas perkara yang dimohonkan PK
2.	Memeriksa persyaratan formil pengajuan upaya hukum dari pihak pemohon PK				- Berkas perkara		Berkas perkara memenuhi syarat
3.	Menghitung biaya panjar permohonan PK yang selanjutnya dituangkan dalam SKUM				- SKUM		Terdatanya kelengkapan biaya proses PK
4.	Menerima bukti penyetoran ongkos perkara PK yang telah disetor ke Bank				- Slip penyetoran biaya perkara		Tersedianya kelengkapan biaya proses perkara
5.	Mencatat transaksi keuangan PK dalam buku jurnal keuangan perkara PK				- Buku Jurnal Keuangan Perkara PK		Tercatatnya transaksi keuangan dalam jurnal
6.	Menyerahkan berkas perkara untuk didaftarkan dalam Buku Register Perkara PK				- Buku Register Perkara PK		Perkara siap untuk didaftarkan

Judul Formulir : Akta Permohonan Peninjauan Kembali  
No. Formulir : FM/019/PR/2016  
Revisi Ke : 00  
Tgl Berlaku : 20 April 2016

**AKTA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI**  
**Nomor : ...../G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....**

Pada hari ini, ..... tanggal ....., menghadap saya : .....  
....., Panitera Pengadilan TUN (lokasi) seorang bernama : .....  
Warganegara Indonesia, Pekerjaan ....., bertempat tinggal di  
....., bertindak untuk dan atas nama : ....., selaku  
TERGGUGAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : ..... tertanggal  
....., yang menerangkan bahwa ia menyatakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : ...../K/TUN/....., tanggal .....

**Dalam perkara antara :**

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Beralamat di : .....  
Semula **PENGGUGAT**, sekarang .....

**Melawan**

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Semula **TERGUGAT**, sekarang .....

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI :**

.....  
.....  
.....

Demikian Akta Peninjauan Kembali ini dibuat yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN (lokasi) dan Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali.

**PEMOHON /KUASA PENINJAUAN KEMBALI**

**PANIT E R A.**

( ..... )

\_\_\_\_\_

Judul Formulir : Berita Acara Sumpah  
No. Formulir : FM/020/PR/2016  
Revisi Ke : 00  
Tgl Berlaku : 20 April 2016

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

**BERITA ACARA SUMPAH**

Nomor : ...../G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, ..... tanggal ....., telah menghadap kami :  
....., Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /  
Perempuan :

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : .....,  
tertanggal ....., Perihal : .....,  
yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Berasal dari : .....  
Berupa : .....

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

**“DEMI ALLAH, Saya bersumpah bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : ...../G.TUN/ ..... / ..... / PTUN.JKT., jo. Peninjauan Kembali Nomor : ..... / PK- ..... / PTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari : ....., tanggal .....”**

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami,.....,  
Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,  
Yang diambil Sumpah

PENGADILAN TUN (lokasi)  
KETUA,

\_\_\_\_\_  
NIP : .....

Judul Formulir : Berita Acara Janji  
 No. Formulir : FM/021/PR/2016  
 Revisi Ke : 00  
 Tgl Berlaku : 20 April 2016

Pasal 67 b jo. Pasal 69 b UU tentang PERATUN

**BERITA ACARA JANJI**

Nomor : ...../G/Tahun/PTUN-(LOKASI)/.....

Pada hari ini, ..... tanggal ....., telah menghadap kami :  
 ....., Ketua Pengadilan TUN (lokasi), seorang Laki-laki /  
 Perempuan :

Nama : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Nomor : .....,  
 tertanggal ....., Perihal : .....,  
 yang pada pokoknya mohon agar diletakkan sumpah atas diketemukannya surat bukti, pada :

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Berasal dari : .....  
 Berupa : .....

Bukti mana akan dipergunakan untuk persyaratan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Adapun lafal Sumpah yang telah diucapkan sesuai dengan Agama yang dianutnya yaitu KRISTEN, yang berbunyi sebagai berikut :

**“DEMI ALLAH, Saya bejanji bahwa surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Peninjauan Kembali (PK), Perkara Nomor : ...../G.TUN/  
 ..... / ..... / PTUN.JKT., jo. Peninjauan Kembali Nomor :  
 ..... / PK- ..... / PTUN.JKT., adalah saya temukan pada hari :  
 ....., tanggal ....., semoga Tuhan menolng saya”**

Sumpah ini dilakukan di hadapan Kami,.....,  
 Ketua Pengadilan TUN (lokasi), sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b, jo. Pasal 69 huruf b Undang-undang tentang Mahkamah Agung.

Pejabat Yang membacakan Sumpah,  
 Yang diambil Sumpah

PENGADILAN TUN (lokasi)  
 KETUA,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

NIP : .....